



## Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal melalui Seni Wayang

Rustiani <sup>1</sup>, Sapto Pramono <sup>2\*</sup>, Sri Roekminiati <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [sapto.pramono@unitomo.ac.id](mailto:sapto.pramono@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** *This research seeks to examine the function of the East Java Provincial Agency for National Unity and Politics (Bakesbangpol) in enhancing community organizations via wayang art, highlighting aspects of public policy and administration grounded in local wisdom. The study utilized a qualitative case study approach. Data were gathered via in-depth interviews, participatory observation, and examination of policy documents and activity reports. Data analysis involved reduction, visualization, and conclusion formulation to uncover consistent trends in policy execution. The results show that Bakesbangpol functions as a regulator, as well as a facilitator, mediator, and catalyst. Empowerment initiatives are executed by enhancing organizational capabilities, promoting cross-sector collaboration, digitizing wayang art, and incorporating cultural values into education and local policies. These initiatives have enhanced social unity, boosted youth involvement, encouraged the creative sector, and solidified East Java's cultural identity. The research showcases a blended framework of public policy that merges contemporary governance with heritage principles, resulting in flexible and enduring results. The uniqueness of this study is in presenting wayang art as a tool for community empowerment and a public policy approach to tackle modern social, political, and cultural issues.*

**Keywords:** Bakesbangpol; Community Organizations; Empowerment; Public Policy; Wayang Art

**Abstrak.** Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur dalam penguatan organisasi masyarakat yang berlandaskan seni wayang dengan menyoroti aspek kebijakan publik dan administrasi berlandaskan kearifan lokal. Pendekatan penelitian memakai metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan kegiatan. Analisis dilaksanakan melalui proses reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan guna menemukan pola yang konsisten dalam penerapan kebijakan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Bakesbangpol berfungsi tidak hanya sebagai pengawas dan pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, serta katalisator. Pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi, menjalin kolaborasi antar sektor, mendigitalisasi seni wayang, serta mengintegrasikan seni dan budaya ke dalam pendidikan dan peraturan daerah. Pengaruh pemberdayaan ini tampak pada penguatan solidaritas sosial, peningkatan keterlibatan generasi muda, perkembangan ekonomi kreatif, serta terbentuknya identitas budaya Jawa Timur. Studi ini menegaskan keberadaan model hibridasi kebijakan publik yang menggabungkan tata kelola kontemporer dengan nilai-nilai tradisional, sehingga menghasilkan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. Inovasi penelitian terletak pada penggunaan seni wayang sebagai alat pemberdayaan ormas serta sebagai strategi kebijakan publik untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya yang ada saat ini

**Kata Kunci:** Bakesbangpol; Kebijakan Publik; Organisasi Kemasyarakatan; Pemberdayaan; Seni wayang

### 1. LATAR BELAKANG

Di Jawa Timur, seni wayang bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk pendidikan nilai, penguat identitas budaya, dan alat untuk menjaga kesinambungan sosial. Wayang menggambarkan kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai moral, spiritual, dan politik nasional, sehingga berpotensi menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting karena tugasnya tidak hanya terbatas pada pengembangan wawasan kebangsaan, tetapi juga mengembangkan organisasi

kemasyarakatan (ormas) agar dapat berperan dalam menjaga stabilitas sosial-politik . Peran Bakesbangpol dalam memanfaatkan seni wayang juga menjawab tuntutan akan pendekatan kebijakan yang lebih kultural untuk membangun ketahanan sosial masyarakat.

Intervensi konkret Bakesbangpol dalam bidang kebudayaan dapat diamati melalui usaha mereka dalam memfasilitasi kolaborasi antar sektor, contohnya berkerja sama dengan universitas, dinas kebudayaan, serta kelompok seni dalam pelaksanaan pagelaran wayang. Pagelaran itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan masalah-masalah publik strategis, seperti partisipasi dalam pemilu dan pencegahan konflik sosial. Pertunjukan wayang kulit dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik kebangsaan kepada publik, sehingga peran seni tradisional beralih menjadi alat komunikasi kebijakan publik. Dengan model intervensi ini, Bakesbangpol berusaha untuk mengintegrasikan elemen edukatif, kultural, dan politik secara bersamaan (Simarmata et al., 2025).

Mekanisme pemberdayaan yang dilaksanakan Bakesbangpol untuk ormas yang berbasis seni wayang mencakup pengembangan kapasitas, penyediaan jaringan, serta dukungan institusi. Ormas yang bergerak dalam bidang seni tidak hanya dibekali keterampilan teknis—seperti pelatihan dalang, karawitan, atau manajemen pagelaran—tetapi juga dikuatkan dalam aspek organisasi, sehingga dapat mengelola program secara berkelanjutan. Penguatan ini meliputi dukungan terhadap sanggar, komunitas pemuda, hingga kelompok literasi budaya agar mereka bisa menggunakan seni wayang sebagai media untuk pendidikan nilai dan pemberdayaan ekonomi (Utami et al., 2021). Studi mengenai komunitas wayang golek dan wayang kulit di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan hanya bisa dicapai jika komunitas lokal memiliki hak milik dan berperan aktif dalam pengelolaan program, bukan hanya sebagai penerima bantuan.

Walau begitu, pelaksanaan program yang berbasis seni wayang juga menghadapi berbagai tantangan. Kolaborasi antar lembaga sering kali tidak berjalan dengan baik, kemampuan internal organisasi masyarakat bervariasi, dan adaptasi seni tradisional terhadap tuntutan modern seperti digitalisasi dan komersialisasi menjadi tantangan tersendiri. Sering kali, ada juga risiko politisasi budaya jika pertunjukan seni dilihat hanya sebagai sarana kampanye politik (Arianto et al., 2025). Penelitian kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan yang berbasis budaya sangat ditentukan oleh konsistensi dukungan regulasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta adanya insentif non-finansial seperti pengakuan dan jaringan kolaborasi. Kondisi ini mengharuskan Bakesbangpol untuk menyusun strategi yang memperhatikan nilai budaya tetapi tetap praktis dalam pengelolaan kelembagaan.

Temuan penelitian sebelumnya juga menekankan fungsi seni pertunjukan dalam memperkuat modal sosial komunitas. Penelitian mengenai pemberdayaan yang bersumber dari seni wayang golek, wayang kulit, dan seni topeng menunjukkan bahwa seni pertunjukan berfungsi sebagai sarana yang menyatukan masyarakat dari berbagai generasi sekaligus mendorong partisipasi sosial-ekonomi. Festival atau pekan wayang terbukti tidak hanya meningkatkan kemampuan komunitas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi lokal serta memperluas jaringan komunitas hingga ke dunia digital. Namun, penelitian itu juga menekankan bahwa evaluasi pemberdayaan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan indikator ekonomi, melainkan juga efeknya terhadap identitas budaya dan kohesi sosial masyarakat. Pandangan ini memperkaya landasan konseptual bagi Bakesbangpol dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis institusional yang memposisikan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebagai penyelenggara acara seni, tetapi juga sebagai fasilitator kelembagaan yang mengasuh ormas agar lebih berdaya melalui media seni wayang. Penelitian ini berfokus pada strategi kebijakan, dinamika internal lembaga seni, serta efek ganda dari pemberdayaan—baik dari segi ekonomi maupun sosial-budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menilai program Bakesbangpol Jatim dalam memperdayakan ormas yang berbasis wayang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberlanjutan kelembagaan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk memperkuat peran seni tradisional dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis untuk pengembangan kebijakan provinsi serta memperkaya sastra pemberdayaan budaya di Indonesia

## **2. LANDASAN TEORI**

Kearifan lokal dipahami sebagai kumpulan nilai, norma, praktik sosial, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dalam sudut pandang kebijakan publik, kearifan lokal bukan hanya hiasan budaya, tetapi juga merupakan sumber daya sosial dan moral yang bisa memperkuat legitimasi serta efektivitas kebijakan. Penelitian mengenai kebijakan pariwisata yang berlandaskan kearifan lokal di Manggarai Barat mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berhasil jika para pelaksana tidak memahami nilai-nilai budaya komunitas setempat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah dan tujuan kebijakan tidak dapat terwujud (Delarista et al., 2025). Hal ini mendukung argumen bahwa kebijakan yang

menggabungkan kearifan lokal memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk diterima oleh masyarakat dan bersifat berkelanjutan.

Dalam konteks administrasi publik, teori organisasi dan kepemimpinan menekankan bahwa pencapaian kebijakan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, struktur birokrasi, serta sikap para pemimpin publik. Birokrasi yang responsif terhadap kearifan lokal dapat menyesuaikan cara pelayanan publik agar menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Studi komunikasi organisasi yang berfokus pada budaya lokal menunjukkan bahwa lembaga publik yang mengadopsi nilai-nilai lokal dalam pola komunikasi baik internal maupun eksternal mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan (Gonda et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi publik yang responsif terhadap budaya menjadi dasar teori penting untuk memahami peran institusi seperti Bakesbangpol dalam pembinaan organisasi masyarakat.

Teori pelaksanaan kebijakan juga memberikan sumbangan signifikan dalam kerangka ini. Model Edward III yang menunjukkan aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi tetap relevan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan berbasis kearifan lokal. Dalam berbagai situasi, seperti kebijakan pelestarian seni tradisional di Aceh (2022–2023), kendala pelaksanaan justru timbul akibat minimnya koordinasi dan ketidaksesuaian regulasi antarlevel pemerintahan. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan seni dan budaya memerlukan alat komunikasi yang efisien dan struktur birokrasi yang fleksibel, sehingga seni tradisional seperti wayang dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat (community empowerment) juga berfungsi sebagai fondasi teoritis yang tidak bisa dipisahkan. Teori pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat harus dijadikan subjek, bukan objek, dalam proses pengembangan. Peningkatan kemampuan, perluasan akses terhadap sumber daya, pembentukan jaringan sosial, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan merupakan indikator utama keberhasilan pemberdayaan. Studi global mengenai pengelolaan warisan budaya (2022) menegaskan bahwa partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan seni tradisi memperkuat rasa memiliki dan kesinambungan program. Dalam ranah wayang, pemberdayaan organisasi masyarakat berbasis seni tidak hanya mendukung pelestarian budaya, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi kreatif dan memperkuat identitas sosial.

Tata kelola yang baik sebagai konsep dalam administrasi publik semakin menekankan pentingnya responsivitas budaya. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas hanya bisa berfungsi secara efektif jika pemerintah mengerti dan menghargai nilai-nilai lokal masyarakat.

Penelitian tentang kebijakan publik di Surakarta (2022) mengindikasikan bahwa penggunaan pendekatan budaya lokal dalam komunikasi kebijakan dapat meningkatkan dukungan terhadap kebijakan dan mengurangi penolakan. Dalam pandangan teori nilai publik, kebijakan seni wayang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan mendukung solidaritas sosial. Ini adalah bentuk nyata dari sumbangan administrasi publik yang peka terhadap budaya.

Berdasarkan penggabungan teori kearifan lokal, penguatan komunitas, pelaksanaan kebijakan, teori organisasi publik, dan prinsip tata kelola yang baik, dapat dipahami bahwa penguatan ormas melalui seni wayang memerlukan dukungan kelembagaan yang fleksibel, struktur birokrasi yang mendukung, serta keterlibatan aktif komunitas seni. Bakesbangpol sebagai instansi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut: merumuskan kebijakan yang sensitif terhadap budaya, meningkatkan kapasitas organisasi seni, serta memaksimalkan seni wayang sebagai sarana pendidikan nilai kebangsaan dan pembangunan sosial. Teori ini mengungkapkan bahwa penelitian mengenai fungsi Bakesbangpol dalam pemberdayaan ormas yang berorientasi pada wayang tidak hanya penting secara kultural, tetapi juga memiliki signifikansi akademis dalam memperluas studi administrasi publik yang berbasis pada kearifan lokal

### **3. METODE**

Pendekatan penelitian ini mengadopsi metode kualitatif melalui desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam kontribusi Bakesbangpol dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada seni wayang, dengan memperhatikan aspek kebijakan publik, administrasi publik, dan pengintegrasian kearifan lokal. Tempat penelitian ditentukan secara sengaja di area yang memiliki aktivitas seni wayang yang tinggi dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, sedangkan subjek penelitian mencakup pejabat Bakesbangpol, pengurus ormas seni, tokoh budaya, dan masyarakat yang terlibat dalam seni wayang. Metode pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan strategi aktor utama, observasi partisipatif untuk merekam praktik pemberdayaan seni di lapangan, serta analisis dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan peraturan yang relevan. Keabsahan data dipertahankan melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta pengecekan kepada informan utama untuk memastikan hasil interpretasi peneliti. Analisis data dilaksanakan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi berulang hingga mencapai saturasi makna (Pahleviannur et al., 2022). Proses analisis ini

disertai dengan pengkodean tematik untuk mengenali pola, kategori, dan hubungan antar konsep yang selanjutnya ditafsirkan dalam konteks teori kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan publik. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur ini, studi diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang strategi Bakesbangpol dalam memanfaatkan seni wayang sebagai alat untuk pemberdayaan sosial, budaya, dan sebagai praktik administrasi publik yang berlandaskan nilai lokal yang berkelanjutan

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam mendukung organisasi kemasyarakatan yang berbasis seni wayang melalui program pelatihan, pembinaan, serta penyediaan bantuan administratif. keberadaan Bakesbangpol sebagai regulator sekaligus fasilitator sangat penting untuk memastikan ormas seni berkembang dengan cara yang legal, mandiri, dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ibrahim & Olii (2024) yang menggarisbawahi peran penting birokrasi publik sebagai jembatan antara negara dan komunitas lokal dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Program pemberdayaan yang dijalankan meliputi penguatan kemampuan organisasi, pemberian wadah untuk ekspresi seni budaya, serta bantuan dalam aspek perizinan dan legalitas. Dari hasil wawancara mendalam, tampak bahwa Bakesbangpol memberikan bantuan dalam manajemen organisasi agar ormas seni wayang tidak hanya menjadi pelestari budaya, tetapi juga berperan sebagai aktor sosial yang dapat menciptakan kohesi masyarakat. Teori pemberdayaan masyarakat menurut Zimmerman (Sururi et al., 2022) menegaskan bahwa fokus pemberdayaan seharusnya ditujukan pada peningkatan kapasitas aktor lokal agar dapat mengelola dan menetapkan agenda mereka sendiri.

Namun demikian, ada tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan SDM di Bakesbangpol untuk menjangkau seluruh komunitas seni di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa peran yang diambil masih bersifat selektif, dan belum sepenuhnya mencakup kelompok seni yang ada di wilayah pedesaan. Keadaan ini sejalan dengan analisis kebijakan publik oleh Howlett & Ramesh (1995) yang menyoroti adanya kesenjangan dalam implementasi ketika sumber daya administrasi tidak sebanding dengan kompleksitas di lapangan.

Walaupun terdapat batasan, keberadaan Bakesbangpol telah berfungsi sebagai alat kebijakan yang menyatukan kearifan lokal seni wayang dengan program resmi pemerintah. Dalam konteks administrasi publik kontemporer, Bakesbangpol berfungsi sebagai penghubung

antara nilai-nilai budaya lokal dan pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab. Konsep partisipatif dalam pemerintahan yang dijelaskan oleh Denhart and denhart (2007) sangat relevan, di mana efektivitas kebijakan publik ditentukan oleh keterlibatan berbagai pihak dan tidak semata-mata oleh aktor pemerintah.

Pemberdayaan ormas seni wayang oleh Bakesbangpol juga berfungsi sebagai upaya mitigasi konflik sosial. Budaya wayang dipandang sebagai sarana komunikasi politik yang berlandaskan perdamaian, sehingga organisasi seni tidak hanya mengutamakan aspek pertunjukan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat mengenai toleransi dan kesatuan. Haryatmoko (2009) menyebutkan bahwa seni daerah dapat berperan sebagai alat soft power dalam kebijakan publik untuk memelihara stabilitas sosial.

Sehingga, temuan penelitian menekankan bahwa tugas Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebatas regulasi dan pengawasan organisasi masyarakat, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang berlandaskan kearifan lokal. Letaknya terletak di titik pertemuan antara birokrasi publik dan perkembangan komunitas budaya, sehingga mencerminkan model kebijakan yang hibrida: administratif dan juga partisipatif. Ini adalah penemuan baru dalam penelitian yang menunjukkan bagaimana seni wayang dapat berfungsi sebagai alat dalam administrasi publik yang berlandaskan pada kearifan lokal.

### **Implementai Kebijakan Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal**

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemberdayaan ormas seni wayang di Jawa Timur dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Bakesbangpol tidak beroperasi sendiri, melainkan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, pemerintah daerah, universitas, hingga media. Pendekatan kerja sama ini sejalan dengan teori pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan pada kebutuhan pemerintah di mana pihak non-negara berperan serta dalam meraih tujuan kebijakan (Firdaus et al., 2023)

Pelaksanaan kebijakan juga tercermin dalam program pelatihan manajemen organisasi, fasilitasi pertunjukan wayang di tempat umum, hingga kompetisi inovasi seni. Data lapangan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya memperkuat keberlangsungan seni wayang, tetapi juga meningkatkan peran generasi muda dalam pelestarian budaya. Hal ini sejalan dengan tulisan Rachmawati & Sensuse (2010) yang menekankan bahwa kebijakan publik yang berakar pada kearifan lokal dapat memicu partisipasi generasi milenial jika disajikan dengan cara yang modern.

Namun, masih ada hambatan dalam pelaksanaan terutama yang berkaitan dengan keterbatasan dana dan proses birokrasi yang berbelut-larut. Sejumlah ormas seni mengeluhkan perlunya waktu lama dalam memperoleh izin dan dukungan dana. Kondisi ini mencerminkan

sebagai “implementation gap”, yaitu perbedaan antara target kebijakan dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (Hudson et al., 2019).

Meskipun begitu, kebijakan penguatan ormas seni wayang tetap berdampak positif dalam mempertahankan kohesi sosial masyarakat Jawa Timur. Wayang tidak hanya dilihat sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan karakter dan nilai-nilai moral. Teori nilai publik oleh Moore menjadi penting di sini, bahwa keberhasilan penerapan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan nilai bersama untuk masyarakat (Tisnawati et al., 2022).

Integrasi seni wayang dalam program Bakesbangpol juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam administrasi publik, dari hanya kontrol politik menuju pemberdayaan budaya. Pendekatan ini sejalan dengan model *New Public Service* yang diusulkan oleh Denhart and denhart (2007), di mana fungsi utama pemerintah adalah memenuhi kepentingan publik melalui kerjasama dan nilai-nilai budaya, bukan hanya menerapkan regulasi administratif.

Sejalan dengan itu, temuan penelitian di tahap implementasi menegaskan bahwa kebijakan pemberdayaan yang berlandaskan kearifan lokal yang diterapkan oleh Bakesbangpol menunjukkan pola tata kelola yang responsif, meskipun masih terhambat oleh faktor birokrasi dan anggaran. Temuan ini menunjukkan praktik hibridisasi antara pengelolaan modern dengan dasar tradisi lokal, yang menjadi sorotan baru penelitian dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan publik yang berlandaskan seni dan budaya.

### **Dampak Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Seni Wayang terhadap Kohesi Sosial dan Kebijakan Publik**

Penelitian menunjukkan bahwa penguatan ormas seni wayang memiliki pengaruh besar terhadap kohesi sosial dalam masyarakat Jawa Timur. Wayang berfungsi sebagai alat pendidikan mengenai toleransi, penolakan radikalisme, dan persatuan bangsa, yang selaras dengan tujuan nasional dalam memperkuat ideologi Pancasila. Ini mendukung teori komunikasi budaya menurut Hall (Halimatusa’diah, 2021), bahwa seni tradisional bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kebijakan publik secara kultural.

Dari sudut pandang masyarakat, penguatan melalui seni wayang memfasilitasi keterlibatan aktif dalam melestarikan budaya serta meningkatkan kesadaran politik yang bersifat inklusif. Ormas seni bukan hanya berperan sebagai pelaku budaya, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program-program sosial. Penemuan ini sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif yang diusulkan oleh Ansell & Gash (2008), di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan publik.



Di samping itu, ada pengaruh ekonomi dari penguatan ormas seni wayang. Banyak komunitas seni yang mendapatkan kesempatan baru untuk tampil dalam acara resmi, festival budaya, maupun aktivitas pariwisata lokal. Implikasi ini berdampak pada perbaikan kesejahteraan para seniman lokal. Pandangan ini sejalan dengan keyakinan UNDP bahwa kebijakan yang berlandaskan budaya dapat menjadi penggerak bagi pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan elemen ekonomi, sosial, dan budaya (Mahardhani et al., 2020).

Akan tetapi, keuntungan positif itu juga disertai tantangan terkait dengan terbatasnya regenerasi pelaku seni. Beberapa kelompok seni wayang menghadapi tantangan untuk menggugah minat generasi muda untuk berpartisipasi, meskipun sudah terdapat program pelatihan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi adaptif melalui digitalisasi seni wayang agar tetap relevan bagi generasi Z. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Tapscott (Manurung et al., 2025) tentang budaya digital yang menyoroti perlunya adaptasi budaya dalam lingkungan digital.

Dampak lainnya adalah penguatan identitas budaya Jawa Timur yang berperan dalam branding wilayah sebagai pusat seni tradisional. Wayang berperan sebagai identitas politik-kultural yang memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang berlandaskan budaya. Dalam konteks teori kebijakan publik, ini sejalan dengan teori umpan balik kebijakan menurut Pierson (Mashudi et al., 2023), yang menyatakan bahwa kebijakan yang berhasil membentuk identitas masyarakat akan memperkuat keabsahan pemerintah dan mendukung keberlangsungan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ormas seni wayang oleh Bakesbangpol berdampak multidimensi: sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ini adalah inovasi penelitian yang menekankan seni tradisional tidak hanya sebagai alat pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik dan administrasi modern untuk memperkuat kohesi sosial, menciptakan nilai publik, serta membangun tata kelola berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal

### **Strategi Penguatan Keberlanjutan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Seni Wayang**

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberlanjutan penguatan ormas seni wayang sangat ditentukan oleh strategi jangka panjang yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol bersama mitra kebijakan yang lain. Salah satu strategi kunci adalah meningkatkan kapasitas organisasi dengan pendidikan manajemen, pelatihan administrasi, dan pengembangan jaringan antar-ormas seni. Langkah ini sejalan dengan teori pengembangan kapasitas dalam administrasi

publik yang diajukan oleh Grindle (Mubarok et al., 2020), yang menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan agar organisasi masyarakat dapat bertahan menghadapi perubahan dalam lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Selain penguatan kapasitas institusi, strategi keberlanjutan juga menekankan pentingnya kerjasama antar sektor. Bakesbangpol memulai kolaborasi dengan sektor bisnis melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pendanaan kegiatan seni wayang, serta dengan perguruan tinggi dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Strategi kolaboratif ini sejalan dengan gagasan kemitraan multi-pemangku kepentingan menurut Emerson & Nabatchi (Wijayanti & Kasim, 2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam aspek sosial-budaya sangat bergantung pada partisipasi berbagai pihak di luar pemerintah.

Digitalisasi seni wayang merupakan strategi krusial untuk memperluas jangkauan dan relevansi seni tradisional di kalangan generasi muda. Berbagai ormas seni telah mulai menggunakan media sosial, platform video, serta saluran digital pemerintah daerah untuk menampilkan pertunjukan secara online. Strategi ini mendukung pandangan Tapscott tentang budaya digital, yang menekankan bahwa budaya tradisional perlu bertransformasi dengan teknologi digital agar tetap relevan dan berkelanjutan dalam ekosistem masyarakat kontemporer (Mashis et al., 2023).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan perlu melibatkan elemen pendidikan formal dan non-formal. Pengintegrasian seni wayang dalam kurikulum sekolah, baik sebagai muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler, dapat menjadi alat regenerasi pelaku seni sekaligus penanaman nilai-nilai kearifan lokal pada generasi muda. Strategi ini yang menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang berorientasi pada budaya dapat menjadi dasar pengembangan karakter bangsa yang inklusif dan responsif (Mahardhani, 2025).

Dari sudut pandang kebijakan publik, keberlanjutan pemberdayaan juga memerlukan regulasi yang tegas dan konsisten. Bakesbangpol harus memperkuat peraturan daerah yang mendukung keberadaan ormas seni, baik dalam hal pendanaan, perlindungan hukum, maupun penyediaan ruang untuk ekspresi budaya. Dalam teori siklus kebijakan yang diuraikan oleh Howlett konsistensi regulasi berperan penting untuk menjamin bahwa kebijakan tidak hanya terbatas pada tahap implementasi sementara, tetapi juga bertransformasi menjadi kebijakan yang terinstitusi dalam jangka panjang (Mahardhani, 2023).

Strategi memperkuat keberlanjutan pemberdayaan ormas seni wayang mencakup empat pilar utama: peningkatan kapabilitas lembaga, kolaborasi antar aktor, digitalisasi budaya, serta

integrasi pendidikan dan regulasi yang berkelanjutan. Keempat pilar ini mencerminkan inovasi kebijakan publik yang berlandaskan kearifan lokal, yang tidak hanya menjaga seni tradisional, tetapi juga menjadikan wayang sebagai alat strategis dalam pengembangan sosial, politik, dan pendidikan di Jawa Timur. Kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa seni wayang lebih dari sekadar warisan budaya, ia merupakan pilar kebijakan publik yang responsif dan berfokus pada masa depan

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan organisasi masyarakat berbasis seni wayang sebagai alat pelestarian budaya serta sarana penguatan kohesi sosial dan pelaksanaan kebijakan publik yang berlandaskan kearifan lokal. Bakesbangpol tidak hanya melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan, tetapi juga berubah menjadi fasilitator, katalisator, dan mediator dalam menjembatani kepentingan negara, masyarakat, serta komunitas budaya. Program penguatan yang dilaksanakan, meliputi pelatihan manajemen ormas, dukungan terhadap kegiatan seni, kolaborasi antar sektor, hingga inovasi digital dalam pertunjukan, telah memberikan pengaruh signifikan dalam melestarikan seni wayang di zaman modern, mendorong keterlibatan generasi muda, memperluas peluang ekonomi kreatif bagi seniman, serta mengokohkan identitas budaya Jawa Timur. Kemenangan ini juga mengindikasikan adanya model hibrid kebijakan yang menggabungkan prinsip-prinsip administrasi publik modern seperti tata kelola yang baik dan tata kelola kolaboratif dengan nilai-nilai tradisi lokal yang responsif. Penelitian ini mempersembahkan inovasi berupa konsep pemberdayaan yang berakar pada kearifan lokal sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berkelanjutan, baik dalam pengawetan seni budaya maupun sebagai strategi untuk pembangunan sosial, politik, dan pendidikan yang inklusif dan berfokus pada masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543571. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Arianto, A. N., Suparto, D., & Permadi, D. (2025). Komunikasi Politik dalam Seni Budaya dan Perwayangan Pilkada Brebes Tahun 2024. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 216228. <https://doi.org/10.24014/JRMDK.V7I2.37673>

- Delarista, S., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Gua Batu Cermin di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469), 5(03), 189201. <https://doi.org/10.69957/PRAOB.V5I03.2278>
- Firdaus, R. A., Mahardhani, A. J., & Sunarto, S. (2023). Local Government Readiness in the era of society 5.0. *International Journal of Social Science*, 3(1), 97102. <https://doi.org/10.53625/IJSS.V3I1.6638>
- Gonda, M. S., Bahfiarti, T., Farid, M., & Komunikasi, I. (2023). Implementasi Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Pelayanan Publik. *Eksprei Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 518534. <https://doi.org/10.33822/JEP.V6I3.6391>
- Halimatusadiah. (2021). Memahami Multikulturalisme Orang Betawi: Modal kultural untuk Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Masa Kini. *KOMUNIKA*, 8(1). <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5713>
- Haryatmoko, H. (2009). Menakar Politik Kebudayaan. *Majalah Kompas*.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Ibrahim, R., & Olii, R. A. (2024). Strategi Reformasi Birokrasi Di Tingkat Lokal: Perspektif Good Governance Dalam Otonomi Daerah Kecamatan Kwandang. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 769-774769 774. <https://doi.org/10.37676/PROFESSIONAL.V11I2.8484>
- Mahardhani, A. J. (2023). The Role of Public Policy in Fostering Technological Innovation and Sustainability. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 4753. <https://doi.org/10.61100/ADMAN.V1I2.22>
- Mahardhani, A. J. (2025). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Administrasi Publik. *Media Penerbit Indonesia*.
- Mahardhani, A. J., Sulton, S., & Sunarto, S. (2020). Peran Civil Society (CSO) dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian di Kabupaten Ponorogo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 5962. <https://doi.org/10.26740/JPSI.V4N2.P59-62>
- Manurung, F., Hasibuan, W. A., Ananda, F., & Nisa, M. (2025). Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Inovatif dalam Menghadapi Era Digital. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14710137>

- Mashis, B. M., Aksa, A. H., Muayyanah, A., & Satriya, M. K. (2023). Komunikasi Digital dan Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan. *Muashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(2), 283312. <https://doi.org/10.35878/MUASHIR.V1I2.916>
- Mashudi, Malta, Novarlina, I., Mahardhani, A. J., & Muliadi, D. (2023). Social Policy and Human Development: A Never-Ending Issue . *Influence: International Journal of Science Review*, 5(1). <https://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/131>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>
- Rachmawati, U. A., & Sensuse, D. I. (2010). Perspektif knowledge management pada e-government di Indonesia. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), 2010(Snati).
- Simarmata, A. W., Kushartono, T., & Yamardi, Y. (2025). Peran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat di Kota Bandung . *Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.3291>
- Sururi, A., Hasanah, B., Malumatiyah, M., & Dwianti, A. (2022). Efektivitas Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Dampak Pembangunan Berkelanjutan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 150162. <https://doi.org/10.20961/SP.V17I2.64931>
- Tisnawati, D., Hidayat, Moh. T., & Permana, I. (2022). Public Value Cash Social Assistance Policy for the Impact of Covid-19 in Jatiwangi District, Majalengka Regency. *Ijd-Demos*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.201>
- Utami, P. S., Sulton, & Wulansari, B. Y. (2021). The Social Innovation of the Prototype of Local Culture of Wayang Golek Reyog Ponorogo. *Proceedings of the 1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)*, 581(Incesh), 294299. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.211028.134>
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2).